

Judul : Tambah Pendapatan daerah,kenaikan pajak jadi jalan pintas
Tanggal : Rabu, 27 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tambah Pendapatan Daerah

Kenaikan Pajak Jadi Jalan Pintas



Deddy Sitorus

ANGGOTA Komisi II DPR Deddy Sitorus menyoroti dampak serius rencana pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD). Pemerintah Daerah (Pemda) berpotensi kehilangan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik.

Menurut Deddy, rencana pemotongan TKD hampir Rp 270 triliun berpotensi memangkas rata-rata sekitar 25 persen dana yang diterima setiap daerah. Padahal, angka 25 persen itu cukup besar bagi daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kecil, karena sangat bergantung pada dana transfer pusat.

"Kalau ini terjadi, Pemda akan kehilangan kemampuan memberikan pelayanan publik dan melakukan stimulan terhadap kegiatan ekonomi," ujar Deddy dalam keterangannya, Senin (25/8/2025).

Dia menilai, pemotongan tersebut bukan hanya menimbulkan masalah teknis, tetapi juga berimplikasi pada situasi politik dan sosial di daerah. Jika jumlah 25 persen itu benar-benar dipotong, kemungkinan tidak akan ada lagi pekerjaan fisik, tidak ada belanja modal, dan belanja pembangunan lainnya.

Saat kunjungan kerja di Surabaya, Jawa Timur, akhir pekan lalu, Deddy mempertanyakan kesiapan Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah tersebut untuk melakukan langkah mitigasi. Jika tidak ada antisipasi, situasi ekonomi daerah bisa terhimpit semakin dalam.

Karena, secara realistis sebagian besar daerah belum siap menanggung pemangkasan anggaran tersebut. Realitanya, cuma sekitar empat kabupaten di seluruh Indonesia yang punya fiskal kuat, pendapatan asli daerah lebih besar daripada dana TKD.

Dia mengingatkan, Pemda tidak menjadikan kenaikan pajak sebagai jalan pintas dalam menutupi kekurangan anggaran. Sejumlah daerah yang memilih menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) justru menuai penolakan masyarakat.

"Daerah terdampak memikirkan cara-cara lebih inovatif, termasuk efisiensi belanja pegawai. Tapi apakah cukup? Untuk daerah dengan fiskal sangat lemah, ini masih jadi pertanyaan. Dampaknya sangat terasa bagi ekonomi daerah dan masyarakat," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif itu.

Deddy menambahkan, kenaikan pajak secara merata berpotensi menimbulkan masalah sosial. Masyarakat kecil dengan pendapatan pas pasan atau bahkan pengangguran diperlakukan sama dengan kelompok ekonomi kuat, jelas akan menimbulkan perlawanan atau ketidaksetujuan.

"Paling mudah memang naikin pajak. Tapi kalau yang dipajaki masyarakat kebanyakan secara pukol rata, tentu akan menimbulkan masalah," ucap Legislator asal Dapil Kalimantan Utara itu.

Dia mendorong Pemda mencari solusi pembiayaan yang lebih kreatif tanpa membebani rakyat kecil.

Kebijakan fiskal yang adil dan berbasis kluster ekonomi menjadi kunci agar masyarakat tetap terlindungi di tengah tekanan anggaran. ■ PYB